

PENINGKATAN KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI

Wanda Triyan Putra

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study sees that the development of cooperatives in Pekanbaru City is not well implemented because the cooperatives are not more active than the active cooperation in Pekanbaru city background of the implementation of Presidential Instruction (Inpres) No.18 of 1998, on Institutional Development of Cooperatives and regulatory ministers of cooperatives and small and medium enterprises Number 17 Year 2015 on Cooperatives Supervision that did not go well. The purpose of this study is to analyze the improvement of Local Government capability in the development of cooperatives in Pekanbaru City Year 2014-2016 and analyze what factors influence the improvement of Local Government capability in the development of cooperatives in Pekanbaru City Year 2014-2016. This research uses qualitative method with descriptive survey research type. The technique of determining the size of the sample using informants, in determining the informant the author use for purposive sampling that research will select the informen that is considered to know the information and problems in depth and can be trusted as a source of data. Primary data obtained directly from respondents through interviews and observation. The result of the research shows that the Regional Government especially the Office of Cooperatives and Micro Small And Medium Enterprises Pekanbaru City inconsistent in improving the capability in the development of cooperatives in Pekanbaru City because it is considered to have a dynamic structure in which structural positions are always changing does not give time and do not put structural positions in place, and in the office structure only a few people have basic cooperatives. Guidance and supervision is very minimal due to decreased budgets and also the understanding of human resources apparatus that is still lacking to carry out coaching, limited personnel in the supervision of so many cooperatives in Pekanbaru City.

Abstrak: Penelitian ini melihat bahwa pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru tidak terlaksana dengan baik karena koperasi yang tidak aktif lebih banyak daripada koperasi yang aktif di Kota Pekanbaru dilatarbelakangi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Permen KUKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peningkatan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016 dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif. Teknik penentuan ukuran sampel menggunakan informan, dalam menentukan informan penulis menggunakan untuk purposive sampling yaitu penelitian akan memilih informen yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Data primer diperoleh langsung dari reponden melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru tidak konsisten dalam meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru karena dinilai mengalami dinamika struktur yang dimana jabatan struktural selalu berubah-ubah tidak memberikan waktu dan tidak menempatkan jabatan struktural pada tempatnya, dan di dalam struktur Dinas hanya beberapa orang yang memiliki dasar perkoperasian. Pembinaan dan pengawasan menjadi sangat minim dikarenakan anggaran yang menurun dan juga pemahaman SDM aparatur pelaksana yang masih kurang untuk melaksanakan pembinaan, keterbatasan personil dalam pengawasan koperasi yang begitu banyak yang ada di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: kapabilitas, pengembangan koperasi, pembinaan dan pengawasan

PENDAHULUAN

Minat masyarakat untuk mendirikan koperasi cukup tinggi, akan tetapi manajemen koperasi masih belum efektif dan efisien dibuktikan dari masih banyaknya koperasi yang ternyata tidak aktif. Jika dilihat dari perkembangan jumlah anggota koperasi juga sangat berfluktuasi.

Keadaan ini membuktikan kurang pahamiannya para anggota akan pentingnya berkoperasi. Dilihat juga dari perkembangan ekonomi di Kota Pekanbaru tidak diimbangi dengan perkembangan keaktifan koperasi di Kota Pekanbaru, kurangnya partisipasi dalam melakukan hal yang yang bersifat wajib dalam melaksanakan RAT

juga tidak menjadi prioritas sehingga banyak terjadi masalah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru

Untuk itu, diperlukan manajemen koperasi yang baik sehingga mampu menciptakan suatu struktur pengendalian intern, sehingga mampu menciptakan sebuah koperasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh pengurus dan anggotanya. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah khususnya oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kapabilitas pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru. Sehingga pengurus koperasi di Kota Pekanbaru dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan koperasi di Kota Pekanbaru.

Menurut Kusumasari, sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang memiliki kapabilitas memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut ialah:¹

- a. Kelembagaan (*Institutional capability*)
Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah
- b. Sumber Daya Manusia (*Human resource capability*)
Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen.
- c. Keuangan (*Financial capability*)
Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam manajemen.
- d. Teknis (*Technical capability*)
Memiliki sistem manajemen dan, sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network kepada

seluruh stakeholder.

- e. Kapabilitas kepemimpinan (*Leadership capability*)

Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk fokus pada peningkatan kapabilitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Koperasi di Kota Pekanbaru tahun 2014-2016.

METODE

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.²

Metode penelitian kualitatif deskriptif, dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.³ Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya.⁴

Pendekatan penelitian berfungsi untuk melihat, mengetahui serta melukiskan fenomena yang sebenarnya terjadi secara rinci dan aktual dengan mengamati masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Berdasarkan ilustrasi diatas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengamati tentang Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam

¹ Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

² Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

³ Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

⁴ Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pengembangan Koperasi di Kota Pekanbaru tahun 2014 - 2016. Idealnya kapabilitas organisasi memiliki 5 indikator yaitu kelembagaan, SDM, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru, Subbag Keuangan, Bidang Kelembagaan, Kabid promosi Pengembangan usaha dan Sarana prasarana, Seksi Akuntabilitas, Seksi Pengawasan, Seksi Pengembangan Kapasitas dan pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Di mana informasi ini diharapkan dapat memberikan jawaban dalam penelitian tentang Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Koperasi di Kota Pekanbaru tahun 2014 hingga 2016.

Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Koperasi

Di bawah ini akan dibahas satu persatu dari indikator yang terdapat dalam variabel peningkatan kapabilitas pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru tahun 2014-2016.

1. Kapabilitas Kelembagaan

kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM untuk pengembangan koperasi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dimana struktur, peran, Tugas pokok dan fungsi didalam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya. Secara regulasi struktur sudah sesuai dengan apa yang sudah di instruksikan tetapi dinamika struktur yang terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sangat berdampak kepada strategi, perencanaan dan realisasi program yang ingin dicapai.

Seringkali kehadiran suatu struktur serta jabatan lebih bersifat politis, lebih didasarkan pada muatan kepentingan daripada kebutuhan yang nyata. Lebih lanjut dikatakan bahwa penentuan suatu jabatan atau posisi juga seringkali didasarkan pada pertimbangan berapa orang atau siapa saja yang yang harus diberi perhatian khusus. Akibatnya, muncul tumpang tindih nama posisi atau jabatan. Suatu struktur yang diciptakan tidak didasarkan pada kemauan atau ke-

kuasaan seseorang, tetapi didasarkan pada kebutuhan nyata untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan baik. Strategi Dinas yang dipilih, kompleksitas pekerjaan, tingkatan pengambilan keputusan, dan dinamika lingkungan menjadi dasar struktur yang dipilih. Harusnya penentuan jabatan juga didasarkan kompetensi yang dimiliki SKPD dalam pendidikan dan pelatihan yang sangat memadai agar dapat mengembangkan ide atau gagasan yang di miliki untuk memberikan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan koperasi di Kota Pekanbaru.

2. Kapabilitas SDM

Kapabilitas sumber daya manusia kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM di bawah (kepala bidang dan staf pelaksana), dari segi pelatihan untuk pengembangan koperasi, karena belum semua pegawai mengikuti pelatihan perkoperasian. Pelatihan sangat penting bagi dinas untuk mencapai target dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Pelatihan dapat memberikan efek yang baik kepada pegawai agar dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan lebih mendalam, dapat memahami perkembangan suatu instansi, memahami sasaran yang akan dicapai, mengerti akan perlunya kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan, dapat dengan mudah memahami Informasi yang disampaikan, dapat memahami setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi, mampu melakukan hubungan-hubungan dengan lingkungan, mampu memahami kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku dalam instansi, mampu memahami sistem dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, mampu memahami dan menerapkan perilaku yang mendukung dan dituntut oleh instansi yang terkait.

Pelatihan dan pengembangan SDM di sebuah instansi pemerintahan merupakan sebuah keharusan dalam memaksimalkan manajemen SDM di instansi tersebut. Peran pemimpin penting bagi perkembangan SDM di instansi terkait. Dari segi sumber daya manusia yang memang terdapat kekurangan kalau dilihat secara personel dan

seharusnya setiap SKPD harus mengikuti pelatihan terhadap pengembangan koperasi, sehingga SKPD Dinas Koperasi harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pengembang koperasi agar terciptanya koperasi yang tangguh, mandiri dan aktif menjalankan ekonomi kerakyatan.

3. Kapabilitas Teknis

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru bertujuan baik, yaitu ingin benar-benar memberikan pembinaan dan pelayanan kepada koperasi-koperasi yang ada untuk memperkuat basis perekonomian rakyat di daerah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi didalam ikut mengurangi angka kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembinaan kepada koperasi bertujuan supaya koperasi tersebut berdaya dan aktif serta maju usahanya dengan melaksanakan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik dan konsisten serta rasa memiliki koperasi dari semua anggota koperasi yang ada.

Namun kondisi yang dihadapi adalah minimnya anggaran dan keterbatasan personil serta pemahaman SDM aparatur pelaksana yang masih kurang untuk melaksanakan pembinaan tersebut sehingga perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif kepada aparatur pelaksana. Jika pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik maka diharapkan koperasi-koperasi yang memperoleh pembinaan dan pengawasan serta pendampingan dilapangan akan semakin mandiri, kuat, tangguh dan professional didalam mengelola koperasinya. Peningkatan kompetensi yang diinginkan adalah pelaksanaan pendidikan Training of Trainer (TOT) khusus pengelolaan perkoperasian yang kedepannya sangat diperlukan untuk melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dan gerakan-gerakan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Penataan aparatur pelaksana dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan organisasi perangkat Dinas, artinya jumlah aparatur pelaksana dengan beban kerja serta kemampuan dan penempatan harus sesuai dengan kualifikasi terutama tenaga pendamping lapangan yang merupakan ujung tom-

bak di dalam melakukan pendampingan kepada koperasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta berupaya membantu mengusulkan proposal bantuan dana bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan. Pendamping juga akan melakukan monitoring dan pengawasan kepada koperasi supaya dapat berjalan dengan efektif dan berdaya guna.

4. Kapabilitas Keuangan

keuangan diatas jelas sangat berpengaruh terhadap program-program yang di rencanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang menyebabkan fokus- fokus kegiatan pengembangan koperasi di kota Pekanbaru menjadi sangat terbatas namun ketika permasalahan-permasalahan yang terjadi pemerintah daerah sangat menyadari bahwa kurangnya anggaran akan menjadi masalah besar terhadap pengembangan koperasi di kota Pekanbaru. Pemerintah tidak melihat yang mana urusan yang wajib yang harus diberikan dana yang cukup, Koperasi adalah salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah.

Setiap program dan kegiatan selalu terkait dengan anggaran, apabila dana yang tersedia tidak cukup menjalankan program, maka akan sulir bagi Dinas Koperasi memberikan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kegiatan dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru. Walaupun demikian masalah anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan program maka Dinas Koperasi dan UMKM harus melihat alternatif lain dalam melaksanakan program pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru.

5. Kapabilitas Kepemimpinan

Perubahan struktur didalam suatu jabatan menjadi sangat sulit bagi Kepala Dinas dalam melihat menguasai keadaan, hambatan dan peluang dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru. Selain tidak diberikan jenjang waktu dalam merealisasikan rencana program pemimpin yang diberikan jabatan tidak mempunyai dasar dalam koperasi dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan perkoperasian. Kepala Dinas adalah seorang pemimpin yang harus mempunyai

sumber daya yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diterima apabila tidak mempunyai keahlian khusus dalam pengembangan koperasi maka akan sulit koperasi-koperasi yang ada menjadi lebih baik. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kinerja Dinas Koperasi agar menguasai keadaan, hambatan dan peluang, sehingga kebijakan yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Kepemimpinan merupakan kegiatan memimpin yang dilakukan oleh pimpinan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi dalam manajemen. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk menggerakkan bawahan agar dapat melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya. Pimpinan merupakan penanggung jawab semua pekerjaan bawahan. Karena itu, pimpinan harus dapat melakukan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kepemimpinan harus dilakukan secara adil dan seimbang. Dalam melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, pimpinan harus membagi ke seluruh bawahannya secara adil dan merata. Dalam hal ini pimpinan juga harus menyesuaikan dengan kemampuan bawahannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Koperasi

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Koperasi di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Sumber daya manusia koperasi yang kurang memadai karena banyak koperasi yang didirikan oleh masyarakat hanya memiliki pendidikan SD-SMA saja sehingga menyulitkan pengelolaan koperasi itu secara profesional, mandiri dan tangguh karena masih banyak yang kurang memahami prinsip-prinsip pengelolaan koperasi terutama tata kelola dan manajemen keuangan koperasi dengan baik dan benar.
2. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi UMKM. Lemahnya akses permodalan Koperasi UMKM ke perbankan ka-

rena tidak tersedianya jaminan sebagai persyaratan untuk memperoleh kredit dari pihak perbankan.

3. Kurangnya perlindungan atas ide-ide dan produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM dan sektor informal serta kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya belum secara maksimal mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut.

SIMPULAN

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru tidak konsisten dalam meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan koperasi di Kota Pekanbaru karena dinilai mengalami dinamika struktur yang dimana jabatan struktural selalu berubah-ubah tidak memberikan jenjang waktu dan tidak menempatkan jabatan struktural pada tempatnya, dan di dalam struktur Dinas hanya beberapa orang yang memiliki dasar perkeroperasian. Teknis menjalankan program dan kegiatan sulit dilakukan karena pemahaman SDM aparatur pelaksana yang masih kurang untuk melaksanakan pembinaan, keterbatasan personil dalam pengawasan koperasi yang begitu banyak dan jumlah anggaran yang didapat menyulitkan Dinas Koperasi maksimal dalam pengembangan koperasi. Selain permasalahan itu Dinas Koperasi dan UMKM juga tidak mempunyai pemimpin yang memiliki dasar dalam perkeroperasian, tidak mengikuti pelatihan khusus perkeroperasian untuk pengembangan koperasi.

Dinas Koperasi dan UMKM tidak menguasai keadaan, hambatan dan peluang sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan koperasi terus terjadi setiap tahunnya. Kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana, terbatasnya personil dalam pengawasan dan terbatasnya anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan menyulitkan Dinas Koperasi dalam pengembangan koperasi. Dampak daripada itu akibatnya pengurus koperasi tidak dapat melakukan pelatihan-pelatihan khusus perkeroperasian sehingga tidak dapat mengelola manajemen koperasi dengan baik, sulit menghasilkan produk yang bagus. Jadi, koperasi menjadi sulit memperoleh akses modal yang mudah untuk

mengembangkan koperasinya. Pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi tidak memberikan perlindungan peraturan dan mendukung koperasi secara maksimal terhadap persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar yang banyak terdapat di Kota Pekanbaru.

DAFTAR RUJUKAN

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.